

LAPORAN PENELITIAN



**PEMETAAN PERMASALAHAN PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN
KEPENDUDUKAN SERTA MODEL SINERGITAS ANTAR OPD DALAM
PENYELESAIAN KABUPATEN OKU TIMUR**

OLEH

Dr. Robi Cahyadi K, M.A

Budi Kurniawan, S.IP, M.Pub,Pol

Fadel Aliemsyah Darmawan

DIBIYAI MELALUI DIPA TAHUN ANGGARAN 2019

KABUPATEN OKU TIMUR

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2019

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perubahan landasan yuridis penyelenggaraan pemerintahan daerah secara restrukturisasi kelembagaan menjadi sebuah keniscayaan. Dalam hal ini, restrukturisasi kelembagaan harus dipahami sebagai salah satu upaya kebijakan untuk membentuk sebuah sistem pemerintahan daerah yang efektif dan efisien (*effective and efficient*), tanggap dan cekatan (*quick and responsive*), terbuka dan bertanggungjawab (*transparent and accountable*), membuka seluas mungkin partisipasi publik (*inclusive and democratic*), serta berkinerja tinggi dalam bidang pembangunan dan pelayanan (*developmental*). Sayangnya, terdapat indikasi bahwa penataan kelembagaan baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota sering dilakukan secara tergesa-gesa dengan orientasi dan pendekatan yang sangat beragam, bahkan tanpa disertai pertimbangan dan pengkajian yang matang.

Daerah yang lain pun sering terjadi perubahan dan atau penggantian Perda tentang SOTK yang masih berusia muda antara 1 hingga 3 tahun. Perombakan organisasi yang terburu-buru atau “asal-asalan” seperti ini, bisa dikatakan sebagai kebijakan yang tidak matang (*immature policy*), sehingga kemampuan lembaga publik untuk menghasilkan kinerja tinggi menjadi sangat diragukan. Disisi lain, keberanian daerah untuk melakukan perombakan organisasi dengan frekuensi yang tinggi

berdasarkan prinsip *trial and error*, dikhawatirkan akan menghabiskan energi pemerintah daerah sekaligus menjauhkan daerah dari hakekat dan filosofi desentralisasi itu sendiri.

Harus disepakati bersama bahwa restrukturisasi kelembagaan pasca kebijakan desentralisasi luas *hanyalah sebuah alat* untuk menjamin agar tujuan utama pemberian otonomi, yakni peningkatan kualitas pelayanan umum, dapat dicapai secara optimal. Dengan kata lain, restrukturisasi kelembagaan bukanlah tujuan akhir dari otonomi daerah, melainkan hanya sasaran antara untuk menciptakan kinerja pelayanan yang prima. Tulisan ini mencoba mengelaborasi lebih dalam berbagai pertimbangan dan logika yang mestinya dipakai dalam melakukan restrukturisasi kelembagaan, serta menawarkan beberapa alternatif model kelembagaan daerah yang potensial untuk dikembangkan dimasa mendatang.

Thomas Dye dalam bukunya " *Understanding Public Policy*" menggambarkan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih untuk dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah. Namun, bagi sebagian ahli, definisi yang dikemukakan Dye dianggap terlalu sederhana serta tidak cukup menggambarkan keseluruhan konsep dari kebijakan James Anderson mengemukakan pengertian kebijakan publik yang lebih kompleks. Menurut Anderson, kebijakan publik pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan terarah yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor dalam menangani masalah – masalah tertentu. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh para pejabat pemerintah untuk menangani masalah tersebut.

Permasalahan utama pelayanan publik berkaitan dengan bagaimana peningkatan kualitas dan mutu dari pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana tatapelaksanaanya, dukungan sumber daya manusia, dan organisasinya. Dilihat dari penyelenggaraannya, pelayanan publik masih memiliki beberapa kelemahan yaitu :

- a. Kurangnya respon. Kondisi ini terjadi hampir semua tingkatan unsur pelayanan publik, mulai pada tingkatan petugas pelayanan sampai dengan tingkatan ketua dari instansi atau organisasi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan
- b. Kurangnya penyampaian informasi. Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat malah berjalan lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.
- c. Kurangnya akses. Berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan terletak jauh dari masyarakat, sehingga masyarakat merasa sulit jika membutuhkan pelayanan tersebut.
- d. Kurang koordinasi. Berbagai pihak pelaksanapelayanan yang terkait satu dengan lainnya dirasa kurang dalam berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait.

- e. Rendahnya kualitas birokrasi. Pelayanan pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Dalam kaitan dengan penyelesaian masalah pelayanan, kemungkinan staf pelayanan untuk dapat menyelesaikan masalah sangat kecil, dan dilain pihak kemungkinan masyarakat untuk bertemu dengan penanggungj awab pelayanan, dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi ketika pelayanan diberikan, juga sangat sulit. Akibatnya, berbagai masalah pelayanan memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan.
- f. Kurang mau mendengar aspirasi masyarakat. Pada umumnya aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu
- g. Kurangnya efisisensi. Berbagai persyaratan yang diperlukan (khususnya dalam pelayanan perijinan) seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan.
- h. Dilihat dari sisi sumber daya manusianya. Kelemahan utamanya adalah berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, dan etika.
- i. Dilihat dari sisi kelembagaan. Kelemahan utama terletak pada disain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, adanya peraturan yang

Berdasarkan isu – isu dan permasalahan tersebut, maka pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, mengadakan inisiatif melakukan kajian Pemetaan Permasalahan Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan Serta Model Sinergitas Antar OPD Dalam Penyelesaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

B. Tujuan Penelitian

Penyusunan Pemetaan Permasalahan Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan Serta Model Sinergitas Antar OPD Dalam Penyelesaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dimaksudkan untuk mengetahui potensi permasalahan-permasalahan kelembagaan dan pelayanan public kepada masyarakat, dalam penguatan kelembagaan pemerintahan. Selanjutnya, tujuan kegiatan kajian dari Penyusunan Pemetaan Permasalahan Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan Serta Model Sinergitas Antar OPD Dalam Penyelesaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dapat menilai dan mengevaluasi kinerja kelembagaan serta pelayanan public serta memperkuat pengembangan kelembagaan di lingkungan pemerintahan.

C. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dengan adanya permasalahan diatas hendaknya pemerintah daerah melakukan perancangan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka memberikan solusi terhadap masalah kebijakan tersebut. Usaha awal untuk

mengambil berbagai kemungkinan langkah bagi pemecahan masalah kebijakan inilah yang dilakukan dalam identifikasi solusi alternatif. Dalam proses ini, pemerintah berupaya mengambil berbagai kemungkinan yang tersedia sebagai solusi-solusi kebijakan. Dalam mengambil solusi yang tersedia, pemerintah tidak harus mengambil

Pilihan secara banyak (mutlak) mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki pemerintah sendiri. Pemerintah dapat mengambil solusi-solusi alternatif yang ditawarkan ataupun dimunculkan. Setelah solusi alternatif diidentifikasi, maka solusi alternatif tersebut kemudian dirumuskan. Semakin banyak rumusan alternatif dihasilkan, akan memungkinkan pilihan-pilihan solusi yang tersedia terhadap permasalahan kebijakan akan semakin banyak. Dari proses definisi dan perumusan alternatif, pada tahapan berikutnya adalah penilaian alternatif. Dalam hal ini, berbagai faktor dipertimbangkan atas berbagai solusi alternatif yang telah dirumuskan. Setelah proses penilaian alternatif dilakukan, maka pada tahap akhir perumusan kebijakan, pemerintah melakukan pemilihan alternatif untuk kemudian menjadi keputusan pemerintah.

Penyusunan Pemetaan Permasalahan Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan Serta Model Sinergitas Antar OPD Dalam Penyelesaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur keluaran yang akan dihasilkan teridentifikasi potensi dan permasalahan bidang pemerintahan daerah di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini baik kelembagaan, sumberdaya manusia,

sarana dan prasarana, teknologi dan pelayanan public terhadap masyarakat dan dunia usaha

II. KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas beberapa konsep tentang kebijakan public dan model pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan. Pembahasan ini dimaksudkan untuk menghindari pengertian pengertian tentang kebijakan. Selanjutnya, pembahasan ini juga memfokuskan pada beberapa teori atau pendekatan terkait pemetaan permasalahan pemerintahan, social dan kependudukan yang ada dan terjadi di Kabupaten OKU Timur.

A. Pentingnya Fungsi Kelembagaan Bagi Kesuksesan Pembangunan

Ahli bisanya mengajukan beberapa pendekatan teori dalam menjelaskan mengapa pembangunan di suatu daerah gagal. Paul Krugman (1999), Jeffery Sachs (2003), Gallup et al (Gallup, Sachs, & Mellinger, 1999), Jared Diamond (1999) berpendapat bahwa letak geography adalah faktor kunci yang menciptakan keragaman iklim, variasi sumber daya alam, jenis penyakit dan biaya transportasi. Ini juga menciptakan tingkat produktivitas pertanian dan sumber daya manusia. Semua faktor ini dapat mempengaruhi kualitas kesejahteraan atau pembangunan. Contoh logika sederhananya adalah jalur perdagangan internasional melalui laut sehingga daerah pesisir menjadi pusat perdagangan sedangkan daerah land lock

atau pedalaman terkunci mati. Namun teori ini terbantahkan jika melihat kasus negara Swiss yang terkunci di Eropa tidak memiliki garis pantai. Swiss ternyata adalah negara yang termaksud makmur di Eropa dilihat dari Product Domestic Bruto (PDB) per capita dan Human Development Index-nya (Acemoglu dan Robinson, 2012).

Ahli lain menyatakan bahwa faktor budayalah yang menjadi penentu kesuksesan pembangunan suatu daerah. Max Weber misalnya, berpendapat bahwa etos kerja Protestan memainkan peran kunci dalam kemunculan masyarakat industri modern di Eropa. Selain itu, Huntington (2000) juga memiliki argumen yang sama tentang faktor penting budaya terhadap perkembangan. Dia berpendapat bahwa Korea Selatan bisa lebih baik dibandingkan dengan Ghana meskipun mereka memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang sama pada 1960-an karena budaya. Ia menyatakan 'Korea Selatan menghargai penghematan, investasi, kerja keras, pendidikan, dan disiplin. Ghana memiliki nilai yang berbeda.' (Huntington, 2000, p. Xiii).

Teori yang paling terkenal adalah untuk konteks Indonesia adalah *the lazy native* dari Rafles. Rafles misalnya mengatkan bahwa kamalasan etnis Melayu sebagai penduduk pribumi yang membuat etnis melayu di Malaysia tertinggal ketimbang etnis pendatang seperti China dan India (Alatas, 1977). Penjelasan Rafles ini tampaknya sangat seksi jika melihat fenomena Sumatera di mana transmigran Jawa baik di Lampung dan Sumatera Selatan khususnya OKU Timur relatif lebih makmur ketimbang penduduk asli seperti suku Komering atau Lampung. Benarkah demikian ?

Teori budaya mudah dipatahkan jika melihat bangsa Jepang hari ini. Jika Jepang hari ini dikenal sebagai bangsa yang disiplin sebenarnya tidak jika dilihat Jepang dahulu kala. Artinya budaya rajin bukanlah yang membentuk kesuksesan pembangunan namun dia dibentuk atau impact dari suksesnya pembangunan itu sendiri. Chang (2007, pp.236-261) menggambarkan dengan menyatakan bahwa alasan bahwa orang Jepang yang sekarang disebut sebagai orang yang rajin dan pekerja keras, juga disebut malas oleh penulis paling barat seabad yang lalu. Dia mengutip sebuah buku 'evolusi orang Jepang' yang ditulis oleh Sidney Gulick yang mengamati banyak orang Jepang 'memberi kesan malas dan sama sekali tidak peduli dengan berlalunya waktu (Gulick, 1903, hal.117 dikutip dari Chang 2007, hal.237).

Teori selanjutnya menitik-beratkan pada penting aspek kelembagaan yang inklusif. Menurut Acemoglu dan Robinson, aspek kelembagaan politik dan ekonomi yang inklusif lah yang menjadi penentu kesuksesan pembangunan. Sedangkan daerah yang gagal pembangunannya disebabkan kelembagaan yang extractive. Acemoglu dan Robinson (2012. pp.118-120) menjelaskan bahwa lembaga ekonomi inklusif memiliki ciri sebagai berikut ; system hak kepemilikan lahan ke individu yang terjamin, sistem hukum yang tidak memihak, dan penyediaan layanan publik yang menyediakan lapangan “bermain” yang adil di mana individu dapat bertukar dan kontrak. Kelembagaan ini juga harus mengizinkan masuknya sektor swasta baru dan memungkinkan individu untuk memilih pekerjaan profesional mereka. Sebaliknya, lembaga ekstraktif mengacu pada lembaga yang dirancang untuk mengekstraksi pendapatan dan kekayaan hanya ke bagian masyarakat tertentu

untuk mendapatkan keuntungan lebih, tidak adanya hukum ketertiban, hambatan masuk dan regulasi yang mencegah pasar yang berfungsi dan menciptakan lapangan “bermain” yang tidak sama level karena ada bagian masyarakat yang lebih diuntungkan.

Selanjutnya untuk lembaga politik, definisi lembaga politik inklusif mengacu pada lembaga politik yang memungkinkan partisipasi luas atau pluralisme dan menempatkan pengawasan terhadap politisi. Berbeda dengan yang inklusif, lembaga ekstraktif berarti absolutisme ketika kekuasaan ada di tangan segelintir orang tanpa sistem checks and balances dan supremasi hukum. Dua tabel di bawah ini merangkum teori institusi menurut Acemoglu dan Robinson (2012).

Pentingnya reformasi terhadap institusi inilah yang saat ini menjadi trend dalam dunia akademik baik ilmu politik pemerintahan, ekonomi dan kebijakan publik. Bahkan Bank Dunia, OECD dan IMF menjadikan perbaikan institusi atau kelembagaan sebagai resep dari kesuksesan pembangunan di berbagai negara.

III. METODE PENELITIAN

A. Sumber Data

Pada tahap awal dari kajian ini merupakan penelitian data sekunder yaitu data-data publikasi baik yang tersedia di instansi pemerintah atau instansi lainnya. Data yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah data sekunder yang pada umumnya berasal dari Bappelitbangda Kab OKU Timur. Adapun data lain dari BPS OKU Timur maupun juga data dan informasi dari studi-studi yang dilakukan pusat studi/penelitian dari berbagai universitas juga artikel-artikel ilmiah dari berbagai pakar yang telah digunakan.

Metode analisis data jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan dalam kadar tertentu disebut sebagai penelitian kebijakan (*policy research*). Ruang lingkup dan metode analisis yang digunakan bersifat *content analitic*, yaitu melakukan analisis dan interpretasi terhadap informasi factual tentang pemetaan permasalahan pemerintahan, social dan kependudukan serta sinergitas antar OPD di Kabupaten OKU Timur. Khususnya dalam sebuah bentuk permasalahan, jenis dan penyebabnya.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Deskripsi Kabupaten OKU Timur

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan ibu kota Kabupaten terletak di Martapura. Ogan Komering Ulu Timur terbentuk sebagai pemekaran Kabupaten dan diresmikan pada tanggal 18 Desember 2003 dengan dasar hukum Undang-Undang No. 37 Tahun 2003. Iklim di kabupaten Kabupaten OKU Timur termasuk tropis basah dengan variasi curah hujan antara 2.554-3.329 mm/tahun. Topografi di wilayah KABUPATEN OKU Timur dapat digolongkan ke dalam wilayah datar (*penepain zone*), bergelombang (*piedmont zone*) dan berbukit (*hilly zone*).

Kabupaten OKU Timur memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas. Kabupaten OKU Timur juga merupakan salah satu daerah penghasil beras terbesar di Sumatera Selatan. Hal ini didukung oleh adanya bendungan perjaya dan jaringan irigasi yang memadai di daerah ini. di sector perkebunan, komoditi andalan dari Kabupaten OKU Timur adalah karet dan sawit. Bahan galian merupakan salah satu aset Kabupaten OKU Timur untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan potensi alamnya meliputi batubara yang tersebar di kecamatan buay madang, madang suku II, martapura dan buay pemuka peliung.

Berikut data nama kecamatan dan luas daerah menurut persentase Kabupaten OKU Timur:

Tabel. 1 Nama Kecamatan dan Luas Wilayah Menurut Persentase Daerah

Kecamatan	Luas Daerah	Persentase terhadap Luas Kabupaten
Martapura	102,16	3,03
Bunga Mayang	113,54	3,37
Jaya Pura	230,17	6,83
B.P Peliung	154,13	4,57
Buay Madang	114,36	3,39
Buay Madang Timur	156,25	4,64
B.P Bangsa Raja	192,95	5,73
Madang Suku II	129,34	3,84
Madang Suku III	195,32	5,80
Madang Suku I	211,25	6,27
Belitang Madang Raya	163,59	4,85
Belitang	354,5	10,52
Belitang Jaya	91,97	2,73
Belitang III	153,87	4,57
Belitang II	153,59	4,56
Belitang Mulya	45,97	2,73
Semedawai Suku III	297,77	1,36
Semedawai Timur	183, 27	5,44
Cempaka	101,0	3,00
Semedawai Barat	225,0	6,68
Total	3370,0	100,00

(Sumber BPS Kabupaten OKU Timur)

Batas-batas wilayah Kabupaten OKU Timur terdiri dari:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan KAbupaten OKU Selatan

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten OKU Selatan dan Lampung

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

V. PEMBAHASAN

A. Aspek Pemerintahan dan sinergitas OPD Kabupaten OKU Timur

Aspek pemerintahan dan sinergitas antar OPD yang ada di Kabupaten OKU Timur bisa dilihat dari beban dan besaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di setiap Tahunnya. Berikut data kapasitas keuangan Kabupaten OKU Timur Tahun 2018:

Tabel 2. Data Kapasitas Keuangan Pemda OKU Timur Tahun 2018

KAPASITAS KEUANGAN DAERAH			
Total Penerimaan	1,668,224,037,631.00		
Belanja tidak langsung wajib	659,946,423,679.00		
Pengeluaran Pembiayaan	1,008,277,613,952		
	PRIORITAS 1	PRIORITAS 2	PRIORITAS 3
Belanja Pegawai	659,946,423,679.00		
Kesehatan dasar	96,454,031,531		
Pendidikan Dasar	119,211,137,800		
PU BM		263,965,253,041	
PERKIM		3,571,000,000	
Perhubungan		4,340,000,000	
Urusan pemerintahan lainnya			472,149,779,880.00
Belanja Tidak langsung lainnya			48,586,411,700.00
TOTAL	875,611,593,010.00	271,876,253,041.00	520,736,191,580.00

Data diatas merupakan salah satu dari sekian banyak problem yang dihadapi daerah-daerah kabupaten di Indonesia. Beban biaya belanja pegawai hampir setengah dari anggaran yang diselenggarakan. Menurut data terakhir tahun 2016 yang berhasil di update oleh BPS OKU Timur menunjukan bahwa pegawai honorer di lingkup pemerintah kabupaten OKU Timur hampir setengahnya dari pegawai negeri sipil.

Tabel 3. Data Pegawai Menurut Golongan dan Satuan Unit Kerja

Unit Kerja	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Honorer
Sekretariat Daerah	-	21	84	32	100
Dinas-dinas	41	1443	3041	2039	1665
Badan-badan	2	64	333	58	586
Kantor-kantor	-	12	42	5	215
Inpektorat Daerah	-	5	26	6	-
Kecamatan/Kelurahan	14	145	239	22	435
RS. Umum OKU Timur	-	43	82	5	141
RS.Umum Daerah	-	27	54	1	35
Sekretariat DPRD	-	12	19	4	49
Jumlah	57	1772	3920	2172	3226

(Sumber BPS Kabupaten OKU Timur Tahun 2016)

Data diatas menunjukan reformsi birokrasi masih menjadi angan-angan pemerintah pusat terhadap daerah. Hal lain yang menunjukan pemetaan permasalahan pemerintahan mulai dari birokrasi yang gemuk dan kurangnya sinergi antar OPD melalui wawancara bersama Sigit Purmono selaku Kabid Data, Pengendalian dan Pelaporan Bappelitbangda sebagai berikut :

“Anggaran belanja rutin/pegawai sangat tinggi ketimbang belanja daerah untuk pembangunan. Kabupaten oku masih mengandalkan DAU.

Dan OKU menjadi salah satu terkecil di provinsi Sumatera Selatan. PAD nya sendiri sangat rendah. Artinya OKU masih ketergantungan dengan pusat bahkan sampai pembiayaan rutin dan belanja pegawai. Anggaran dinas PU paling tinggi dari dinas atau opd yang ada sesuai amanat UU sebesar 25%. Dilain sisi ego antar opd masih ada. Tak dipungkiri disemua daerah mungkin juga ada. Antar opd cenderung kurang memahami skala prioritas yang dihadapi pemda OKU kedepan. Pada tahun 2017 juga sebenarnya sudah dilakukan restrukturisasi untuk birokrasi organisasi untuk merampingkan opd. Sekarang opd cenderung tumpang tindih antar satu sama lain. Hal ini yang menjadi perhatian kita sekarang mau ditinjau ulang kembali. Birokrasi”.

Birokrasi yang gemuk dan sinergitas antar opd bukan tanpa sebab. Salah satu penyebab besarnya belanja daerah dikarenakan organisasinya over weight. Pemerintah daerah sebaiknya membentuk organisasi sesuai dengan kebutuhan dan melihat prioritas anggaran yang akan dipakai tanpa harus mementingkan badan atau organisasinya masing-masing dan dapat menghindari organisasi yang gemuk dengan jenjang hirarki yang panjang baik dengan melihat kebutuhan dan kegunaan tugas dan fungsi para pegawainya masing-masing.

Dengan demikian, harapan untuk mensukseskan pelaksanaan otonomi daerah dengan semangat reformasi birokrasi yang sudah bergulir saat ini dalam bidang kelembagaan akan sukses. Reformasi birokrasi bisa tercapai dengan bagaimana pemangku kepentingan di daerah baik Pemerintah Daerah dan DPRD bekerjasama dengan tidak

mengedepankan kepentingan politiknya masing-masing. Melainkan kepentingan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utamanya.

Berkaca pada data APBD diatas dana public umumnya banyak dipakai untuk kegiatan pemerintah ketimbang pembangunan. Untuk itu perlu ada rasionalisasi anggaran dengan memperkecil honorer di luar guru dan tenaga kesehatan serta belanja tidak langsung lainnya seperti ATK yang membebani anggaran secara perlahan. Kemudian anggaran lebih dialihkan untuk pembangunan terutama pemberantasan kemiskinan. Jangan sampai anggaran dari rakyat, oleh pemkab dan untuk pemkab, sedangkan untuk kembali ke rakyatnya hanya tetesan anggaran yang sedikit. Untuk itu perlu ada *political will* dari kepala daerah dan anggota DPRD.

Selain itu kelembagaan ekonomi di OKU Timur masih extractive. Kebanyakan kegiatan bisnis di luar sektor agraris adalah kegiatan ekonomi swasta dalam bentuk kontrak-kontrak proyek pemerintah baik pengadaan barang dan jasa dan infrastructure. Sayangnya kebanyakan proyek-proyek tersebut masih exclusive kepada kontraktor yang punya kedekatan politik dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Umumnya anggota DPRD memiliki perusahaan “pinjam nama” untuk ikut tender proyek-proyek pemerintah. Indikator ini bisa dilihat dari pernyataan beberapa PNS yang diwawancarai yang tidak mau namanya dicantumkan.

Biaya politik yang tinggi membuat usaha balik modal anggota DPRD adalah dengan cara mendirikan perusahaan-perusahaan “pinjam nama” yang dimana nama mereka

tidak ada secara legal formal namun sejatinya perusahaan – perusahaan itu milik mereka. Dengan mengetahui mata anggaran saat dibahas maka disitulah kemudian perencanaan untuk bagi-bagi proyek tender dimulai.

Permasalahan seperti ini sebenarnya banyak bahkan lazim terjadi di Indonesia tidak hanya di OKU Timur. Untuk itu kemudian agar terjadi partisipasi dan transparansi publik maka diperukan sebuah partisipasi publik untuk mengontrol APBD dari perencanaan hingga realisasinya. Jika kelembagaan berhubungan erat dengan tingkat kemakmuran maka sudah saatnya merubah kelembagaan OKU Timur agar berubah dari extractive ke inclusive sebagaimana telah dikemukakan oleh Acemoglu dan Robinson (2012).

Ada beberapa rekomendasi untuk melakukan perbaikan institusi jika belajar dari sukses negara maju dan sukses daerah lain di Indonesia. Misalnya penerapan e-budegting yang membuat masyarakat bisa terlibat langsung memantau hingga satuan tiga RAPBD dan APBD realisasi. Pemerintah DKI Jakarta dibawah Jokowi dan Ahok serta Walikota Surabaya Tri Rismarini telah memulai. Tidak hanya memantau masyarakat juga bisa melakukan partisipasi dengan cara mengusulan program dan anggaran melalui aplikasi dengan memberi komentar dan saran terhadap draft RAPBD. Pemerintah DKI Jakarta dibawah Gubernur Anies Baswedan sedang menginisiasi membuat program e-budgeting baru dengan menggandeng beberapa perusahaan -perusahaan starup dan informatika untuk membuat aplikasi smartphone agar APBD bisa dipantau dan masyarakat bisa berpartisipasi. Dengan cara yang sama Pemkab OKU Timur bisa

berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta dan atau Pemkot Surabaya agar dibantu mengembangkan system e-budgeting.

Fenomena permasalahan lemahnya sinergitas antar OPD juga terjadi ketika ada dua mata hari kembar antara bupati dan wakil bupati yang sama-sama ingin mencalonkan diri kembali bersaing menjadi bupati dalam pemilihan kepala daerah 2020 nanti. Dalam wawancara dengan anggota KPU OKU Timur Yuliansyah terungkap yang tidak dikemukakan sebelumnya bahwa ada persaingan serius yang membuat sinergi pemerintahan menjadi sangat lemah. Akibatnya ada pimpinan OPD yang pro Bupati pertahana adapula yang pro wakil bupati pertahana yang mau mencalonkan diri jadi bupati. Jika ada rapat yang diadakan wakil bupati maka kepala dinas yang pro bupati tidak hadir begitupula sebaliknya. Permasalahan ini menjadi dilemma di banyak daerah. Untuk menyelesaikan masalah ini maka perlu ada netralitas birokrasi diantara kepala dinas. Netralitas terkadang lebih mudah disebutkan namun dalam praktik susah, Untuk itu kemudian perlu adanya komitmen di awal agar tidak ada “kawin paksa” diantara pasangan calon. Ketika masalah sudah terlanjur terjadi yang bisa dilakukan hanyalah keinginan dan inisiatif baik dari elite politik untuk mementingkan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi dan golongan.

B. Aspek Sosial Kemiskinan dan Keamanan.

Pada aspek social kemiskinan di Kabupaten OKU Timur masih dalam kategori lebih baik apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan,

namun memang grafik kemiskinan yang terjadi di Kabupaten OKU Timur cenderung tidak stabil naik turun dalam setiap tahunnya. Faktor kemiskinan nampaknya sudah menjadi gejala umum, namun hal ini bukan berarti pemerintah daerah tidak memikirkan hal-hal baru guna mengurangi tingkat kesmiskinan di daerahnya. Berikut data kemiskinan menurut kabupaten/kota se – Provinsi Sumatera Selatan :

Tabel 4. Data Kemiskinan Menurut Kab/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Tahun 2016
Ogan Komering Ulu	13.29
Ogan Komering Ilir	16.03
Muara Enim	13.56
Lahat	17.11
Musi Rawas	14.30
Banyuasin	11.72
Ogan Komering Ulu Selatan	10.95
Ogan Komering Ulu Timur	11.29
Ogan Ilir	13.80
Empat Lawang	12.54
PALI	14.26
Musi Rawas Utara	20
Palembang	12.04
Prabumulih	11.44
Pagar Alam	9.19
Lubuk Linggau	13.99

(Sumber BPS Kabupaten OKU Tahun 2016)

Data diatas disampaikan juga oleh Kabid Data, Pengendalian dan Pelaporan Bappelitbangda Kab. OKU Timur Sigit Purmono sebagai berikut:

“Masalah kemiskinan atau ekonomi. Kemiskinan timbul karena masalah harga komoditas pangan yang tinggi dan sector jual produksi yang melemah. Sector pertanian dan perkebunan adalah padi dan karet. Padi

menyumbang 1 juta ton pertahun untuk OKU. Solusi pemerintah adalah menekankan kepada masyarakat dan pemerintah untuk membuat kualitas karet dan padi berkualitas sehingga persaingan penjualan tidak kalah dengan tengkulak. Masalah dasar adalah pasca produksi. Masalah social lain ialah masalah narkoba. Salah satu kebijakan daerah ialah melarang orgen tunggul sampai malam hari demi mengurangi keributan dan indikasi narkoba dan minuman keras”

Masalah social lainnya seperti konflik dan keamanan di KAbupaten OKU Timur dari tahun ke tahun selalu membaik dan menunjukkan trend penurunan yang sangat positif, hal ini dijelaskan oleh Yuliansyah selaku Sekretaris KPU Kab. OKU Timur

“Untuk tingkat konflik social seperti kriminalitas masih ada tapi relative tidak sebanyak dulu. Tren positif dari tahun ketahun memberikan dampak yang bagus. Permasalahan yang masih harus ditingkatkan ialah tingkat penggangguran atau lapangan pekerjaan”.

Permasalahan kemiskinan menjadi tugas besar pemerintah daerah, bukan hanya pemerintah daerah yang terlibat langsung, melainkan juga harus adanya peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah yang berbasis pada pemberdayaan masyarakatnya. Karena itu, World Bank mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara dengan menyuarakan pendapat, ide dan gagasan dan mampu berani memilih konsep atau tindakan yang akan dijalani. Dengan

kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Narkoba adalah salah satu masalah sosial yang menjadi concern masyarakat OKU Timur. OKU Timur memiliki daerah yang dijuluki “jalur Texas” atau jalur desa desa disepanjang sungai Komering yang mayoritas dihuni oleh suku Komering. Maraknya pengedaran narkoba disinyalir oleh beberapa responden yang tidak mau disebutkan namanya dikarenakan keterlibatan pihak aparat penegak hukum. Pengedaran narkoba terutama terjadi di acara pernikahan saat dini hari. Adanya larangan pemerintah daerah untuk mengadakan pesta pernikahan hingga malam hari adalah langkah maju, namun harus ada sinergi dengan aparat penegak hukum terutama kepolisian. Kepala daerah dan pimpinan polres daerah seharusnya lebih fokus agar masalah beredarnya narkoba karena keterlibatan aparat dapat diberantas demi masa depan anak-anak OKU Timur ke depan.

Jalur Komering disinyalir menjadi centra Kemiskinan di OKU Timur menurut beberapa responden. Ironisnya adalah Jalur Komering adalah basis dari penduduk asli suku Komering. Dibandingkan orang Jawa yang umumnya tinggal di daerah transmigran Jawa seperti Belitang, maka daerah jalur Komering lebih miskin. Hal ini seakan-akan membuktikan tesis Raffles tentang pribumi yang malas ada benarnya. Namun jika kita lihat lebih dalam penduduk Suku Komering relative lebih berhasil secara Pendidikan dan ekonomi jika merantau. Budaya merantau ini membuat sebagian besar orang suku komering banyak sukses di Palembang dan di Jawa. Yang tersisa di kampung kemudian

mereka yang memang secara Pendidikan lemah. Untuk itulah perlu ada affirmative policy dari Pemkab OKU Timur agar anak suku Komerling dapat kembali ke daerah membangun kampung, Jangan jadikan kampung tempat mereka yang “sisa”.

Diaspora Komerling yang menyebar di berbagai daerah baik dalam dan luar negeri sebenarnya potensi yang luar biasa secara ekonomi dikembangkan oleh Pemkab untuk memajukan daerahnya. Ada banyak macam program yang bisa dilakukan untuk membangun kampung suku komering oleh diaspora di luar. Misalnya investasi di luar perkebunan yang bisa membuka lapangan kerja. Pariwisata pertanian duku komering juga bisa dikembangkan. Membangun sekolah dan menempatkan guru guru berkualitas yang digaji Yayasan diaspora juga bisa jadi solusi bagi daerah.

Dengan dana desa yang besar dari pemerintah pusat masalah kemiskinan di desa jalur komering seharusnya selesai. Untuk itu pendampingan kepala desa dan melibatkan masyarakat perlu dikembangkan. Kolaborasi dari jajaran Pemkab, kepala desa, konsultan dari kampus dan luar kampus dan masyarakat perlu diciptakan untuk menjawab permasalahan kemiskinan di jalur komering.

Community Action Plan (CAP) adalah program yang bisa ditawarkan untuk desa desa miskin terutama di jalur komering. CAP adalah metode perencanaan yang mendorong komunitas atau warga desa bertindak untuk merancang, mengimplementasikan dan mengatur program pembangunan desanya sendiri. Namun dalam CAP diperlukan pula pendekatan yang memadukan partisipasi public secara bottom up dan sentuan

teknokratic. Untuk pendekatan teknokratis inilah mengapa diaspora muda Komerling lulusan universitas seperti UNSRI, Unila dan Universitas top lainnya perlu dilibatkan. Dengan adanya CAP maka trust akan dibangun, kepala desa tidak dicurigai korupsi, masyarakat tidak asal mengusulkan karena ada mereka yang memberi sentuhan teknokratis berdasarkan pendekatan ilmu teknik perencanaan wilayah desa, sosiologi desa, ekonomi desa serta politik dan pemerintahan di desa.

C. Aspek Kependudukan dan Pelayanan Publik

Pemetaan permasalahan kependudukan di Kabupaten OKU Timur dikatakan bahwa kabupaten ini menempati posisi ke empat dengan catatan penduduk terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan. Berikut data kabupaten/kota dengan jumlah penduduk se - Sumatera Selatan:

Tabel 5. Data Jumlah Penduduk Kab/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Tahun 2018
Ogan Komerling Ulu	364.260
Ogan Komerling Ilir	821.528
Muara Enim	628.661
Lahat	405.605
Musi Rawas	400.239
Banyuasin	846.269
Ogan Komerling Ulu Selatan	358.510
Ogan Komerling Ulu Timur	670.653
Ogan Ilir	424.774
Empat Lawang	247.544

PALI	187.554
Musi Rawas Utara	190.222
Palembang	1.651.857
Prabumulih	185.895
Pagar Alam	137.964
Lubuk Linggau	229.889

(Sumber BPS Kabupaten OKU Tahun 2018)

Dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit. Kabupaten OKU Timur dalam menyelenggarakan pelayanan public dan izin bagi masyarakatnya cukup baik. Hal ini terlihat dari berbagai aktivitas di beberapa dinas yang berkaitan dan bersentuhan langsung dengan keperluan masyarakat. Diantaranya dinas catatan sipil dan PTSP. Berikut beberapa dokumentasi dan juga pernyataan informan yang berhasil diwawancarai :



Menurut Mawarzi selaku Kabid Pengaduan dan Kebijakan Dinas PTSP menjelaskan tentang pelayanan yang ada di dinas PTSP selama ini

“Untuk pengaduan dalam hal pelayanan disini tidak ada. Selama syarat yang lengkap untuk mengurus izin, SOP kita jalani tanpa mempersulit. Bentuk layanan pengaduan bersifat website maupun personal. Pelayanan pelayanan perizinan di ptsp sebulan bisa 15 orang perbulan

kecuali pada musim tender proyek dimulai, ptsp pasti ramai dan target IMB pun tahun ini sudah melampaui target yang ditetapkan, dari yang ditargetkan 1 Milyar sekarang sudah 1,1 Milyar”.

DAFTAR PUSTAKA

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail : The Origins of Power , Prosperity and Poverty*. New York: Crown Business.

Alatas, S.H., 2013. *The Myth of the Lazy Native: A Study of the Image of the Malays, Filipinos and Javanese from the 16th to the 20th Century and Its Function in the Ideology of Colonial Capitalism*. Routledge.

Chang, H.J., 2007. *Bad Samaritans: The guilty secrets of rich nations and the threat to global prosperity*. Random House.

Diamond, J. (1999). *Guns, germs and steal : the fates of human societies*. Perspectives in Biology and Medicine

Gallup, J. L., Sachs, J. D., & Mellinger, A. D. (1999). Geography and economic development. *International Regional Science Review*, 22(2), 179–232

Mardianto & Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Penerbit Alfabeta : Bandung

Sachs, J. D. (2003). Institutions don't rule: Direct effects of geography on per capita income. NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, Working Paper 9305, NBER Worki, 1689–1699.

ARTIKEL-ARTIKEL

Badan Pusat Statistik Kabupaten OKU Timur